

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Untuk mendeskripsikan bagaimana keberhasilan Implementasi kebijakan program Kartu Prakerja pada masyarakat Nagari Ganggo Hilia Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi Implementor Kebijakan dan dari sisi sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini yang menjadi implementor kebijakan program Kartu Prakerja adalah lembaga Dinas Tenaga Kerja yang berada di Kabupaten Pasaman, sedangkan yang menjadi sasaran kebijakan/*target group* adalah masyarakat Nagari Ganggo Hilia yang menjadi peserta dari program Kartu Prakerja.

Dengan merujuk pada indikator teori Grindle dari segi *sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan*, program bersifat sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima kebijakan bukan untuk jangka panjang. Dari segi *apakah letak sebuah program sudah tepat*, jika ditinjau dari segi manfaat ekonominya saja bisa dikatakan sudah tepat namun secara umum program masih kurang tepat. Dari segi *apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci*, implementor Program Kartu Prakerja hanya ada sampai tingkat Kabupaten/ Kota selain itu pertanggungjawaban tugas dan perannya tidak ada.

Dari segi *apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai*, sumber daya manusia yang ada sudah cukup mumpuni namun dari segi sumber daya

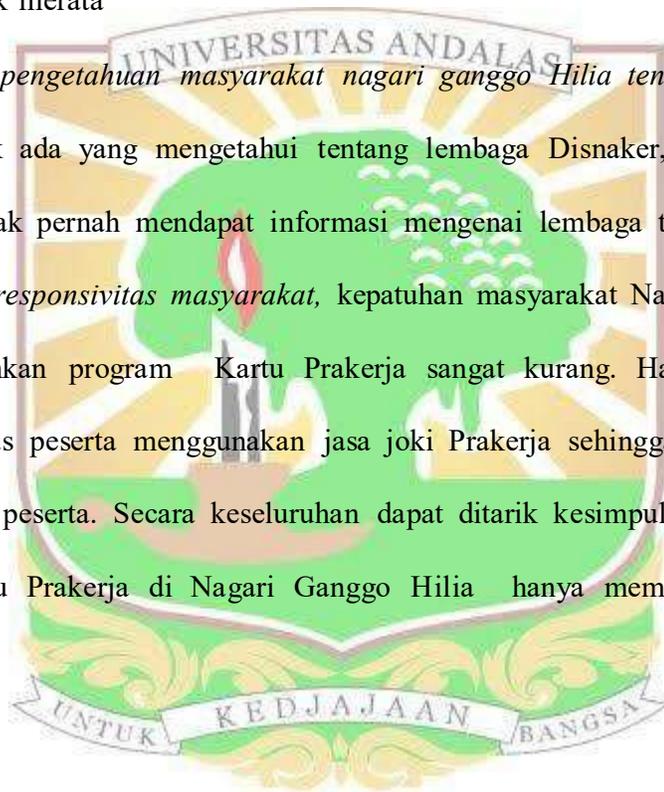
teknologi maupun jaringan internet yang ada di Disnaker tidak memadai. Keberadaan perangkat teknologi masih sangat terbatas sedangkan untuk jaringan internet tidak memadai. Dari segi *seberapa besar kekuasaan dan pihak yang kepentingannya dipengaruhi*, selain sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye pemerintahan saat ini tidak terdapat motif atau kepentingan yang terselubung dalam kebijakan Program Kartu Prakerja, terbukti dengan tidak adanya strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan Program Kartu Prakerja. Dari segi *karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa*, pada indikator ini tidak ada konflik kepentingan maupun konflik kepentingan politik yang terlihat.

Implementasi dilihat dari sisi kebijakan berkesimpulan, dari segi *bagaimana kepentingan masyarakat yang tergambar dalam isi kebijakan*, kepentingan peserta Program Kartu Prakerja di Nagari Ganggo Hilia tidak lain adalah hanya untuk mendapatkan uang saja. Dari segi *jenis manfaat yang diterima oleh target group*, jenis manfaat yang paling dirasakan oleh peserta program Kartu Prakerja yakni dari segi uang, hanya sedikit dari peserta yang memanfaatkan program Kartu Prakerja dari segi ilmu yang diberikan.

Dari segi *sejauh mana perubahan yang dirasakan oleh penerima kebijakan*, bentuk perubahan yang dirasakan oleh penerima kebijakan di Nagari Ganggo Hilia tidak terlihat secara nyata. Selain uang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari manfaatnya hanya dapat dirasakan untuk sementara waktu, dengan gamblang semua informan mengatakan bahwa belum ada perubahan yang signifikan terjadi pada mereka setelah mengikuti program tersebut. Dari segi *apakah letak sebuah program*

sudah tepat letak program sudah tepat jika dinilai dari segi kondisi ekonomi masyarakat, program ini sudah tepat diberikan kepada masyarakat Nagari Ganggo Hilia dengan kondisi ekonominya yang masih rendah, namun dari segi kondisi sosial dan segi kemampuan teknologi masyarakat, program ini tidak tepat diberikan kepada masyarakat Nagari Ganggo Hilia karena kemampuan penguasaan teknologi pada masyarakat tidak merata

Dari segi *pengetahuan masyarakat nagari ganggo Hilia tentang implementor kebijakan*, tidak ada yang mengetahui tentang lembaga Disnaker, semua informan mengatakan tidak pernah mendapat informasi mengenai lembaga tersebut. Dari segi *kepatuhan dan responsivitas masyarakat*, kepatuhan masyarakat Nagari Ganggo Hilia dalam menjalankan program Kartu Prakerja sangat kurang. Hal tersebut terjadi karena mayoritas peserta menggunakan jasa joki Prakerja sehingga tidak tergambar keseriusan dari peserta. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta program Kartu Prakerja di Nagari Ganggo Hilia hanya membutuhkan insentif semata.



6.2 Saran

Dari simpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa sasaran baik saran teoritis maupun saran praktis, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas implementasi kebijakan program pemerintah hendaknya lebih memperhatikan ketepatan teori yang dipilih dan memahami secara komprehensif teori yang telah dipilih tersebut agar lebih terarah dalam melakukan penelitian
- b. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian saat ini sumber-sumber dan referensi yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder untuk menghasilkan data yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus sebaiknya pada saat melakukan wawancara dalam menggali data kepada informan dilakukan dengan santai dan tidak terkesan formal agar bisa melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data yang lebih alamiah.
- d. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang Implementasi Program Kartu Prakerja sebaiknya bisa melakukan penelitian pada cakupan yang lebih luas seperti pada lingkup Kabupaten/Kota. Namun Jika ingin melakukan penelitian pada lingkup yang lebih kecil seperti Nagari/ Desa sebaiknya lebih berfokus pada dampak implementasi.

6.2.2. Saran Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintah sebagai agen pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang hendak dilaksanakan sampai ke jenjang pemerintahan yang paling bawah, agar masyarakat lebih efisien ketika memiliki kendala dalam menjalankan program kebijakan
2. Kepada implementor kebijakan sebaiknya harus bisa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh sasaran kebijakan, dan juga hendaknya langsung turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi sasaran kebijakan
3. Bagi pembuat kebijakan hendaknya lebih mendalami pengkajian terhadap prediksi *unintended impact* dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Serta lebih mendalami kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan agar program terlaksana dengan sebagaimana mestinya.
4. Bagi penerima kebijakan hendaknya mengikuti program kebijakan dengan sebagaimana mestinya karena jika tidak dijalankan dengan semestinya tidak akan tercapai esensi tujuan dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.